

BUDAYA MUAKHI DAN PEMBANGUNAN DAERAH Perspektif Filsafat Sosial pada Komunitas Adat Pubian di Lampung

Lasiyo* dan A. Fauzie Nurdin**

Abstract

The research entitles "The Culture of Muakhi and local development." The relevant concept of muakhi with local development can be analyzed based on philosophy of social approach with focusing on the local culture. Muakhi as an ethical value and attitude is based on brotherhood and equality. It is a philosophical concept as a basic values of social ethic in Lampung Pubian community. Muakhi can also be taken as a approach to settle social, cultural, economic, and political problems. So in developing the study of social, the concept of muakhi can be taken as a new theory by taking its value, and norm for empowering local community and local development in a large.

Keywords: Culture of Muakhi, Empowering Local Community, Basic Values of Social Ethic, and Society Development.

I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan hidup bersama di dalam masyarakat, dan memiliki daya pikir, rasa, dan kehendak. Pakar Filsafat Sosial, Brian Fay menyatakan, manusia adalah makhluk yang berkesadaran, namun manusia hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Untuk itu perlu memahami manusia sebagai dirinya sendiri, masyarakat dan kebudayaannya (2002: ix). Pemikiran itu sesuai dengan fakta bahwa dalam kehidupan sosial manusia saling memerlukan bantuan dan kerjasama sehingga melahirkan kebudayaan, dan kebudayaan mempengaruhi tingkah laku manusia. Manifes-tasi tindakan, sikap dan perilaku setiap

orang maupun kelompok sosial, yang khas insani terjadi dalam proses sosial secara dinamis.

Pembangunan masyarakat lokal di era global menjadi tanggung jawab moral manusia sebagai pelaku kebudayaan *post-modern* yang penuh dengan ketegangan, kehilangan kepastian bentuk, makna dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pakar tentang ‘kritik moral pembangunan’ Philip Quarles menyatakan, wacana dan praktik pembangunan berada dalam ketidakselarasan yang kritis. Pelaku-pelakunya mengalami serangkaian ketidakselarasan, ketidaksesuaian, atau kotradiksi, baik dalam kegiatan rutin pembangunan sehari-hari maupun dalam konteks makro pembangunan (2004: 14). Terkait persoalan itu dijelaskan, budaya lokal perlu dikaji karena memiliki karakteristik yang cukup efektif untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan menyelesaikan konflik yang terjadi (Moh. Roqib, 2007: 5).

Pembangunan masyarakat lokal membutuhkan penyesuaian unsur-unsur budaya lokal dan kemungkinan penerapannya dalam kebudayaan nasional dan global. Hal itu sekaligus merupakan upaya kongkrit pelestarian nilai etika sosial dalam masyarakat lokal, dan juga dapat menguntungkan budaya lokal lain yang menerimanya. Lebih jauh, penetrasi nilai budaya asing dapat diseleksi sekiranya ada yang tidak sesuai dengan nilai dan norma adat masyarakat lokal, dan perlu diantisipasi agar kekuatan dan ke-unggulan daerah (*local wisdom*) tetap eksis dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat.

Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki filsafat atau pandangan hidup, meski dari aspek penduduk terdapat ragam suku dan agama yang dianut. Filsafat masyarakat lokal itu tidak terlepas dari nilai, norma dan agama yang dianut, terutama bagi kalangan suku Lampung asli yang menganut agama Islam. Dalam masyarakat adat terdapat ragam tradisi yang berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. Secara umum, “ada dua kelompok masyarakat adat yaitu *Saibatin* dan *Pepadun*. Masyarakat adat Pepadun terdiri dari Abung, Pubian, Rarem Mego Pak, Bunga Mayang Sungkai, Way Kanan Lima Kebuiyan serta Melinting. Pemimpinnya disebut Punyimbang (Rizani Puspawidjaja, 2006: 24).

Filsafat hidup bagi masyarakat adat Lampung disebut “*Piil Pesenggiri*”, yang terdiri dari *Juluk adek*, *Nemui nyimah*, *Nengah nyappur* dan *Sakai Sambayan*. Filsafat hidup itu bersumber dari kitab undang-undang adat masyarakat Lampung,

yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempalo, dan Keterem. Filsafat hidup itu terbuka, fleksibel dan mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Menurut Kaelan, ‘filsafat hidup masyarakat berkembang dan menyatu dalam kehidupan sosial budaya masyarakat’ (2005: 300). Berarti filsafat sosial menerima masukan dari pandangan hidup, ajaran agama, ideologi, paham atau pemikiran yang dinamis dan kreatif. Sehingga dapat sesuai dengan dinamika pembangunan dan diterima masyarakat serta peradaban dunia.

Relevansi *muakhi* dan pembangunan daerah dapat dianalisis dengan filsafat sosial menjadi penting, sebab kebenaran objek material maupun objek formalnya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar pemikiran itu, setidaknya ada dua asumsi dasar untuk membangun konsep *muakhi*, yaitu: *pertama*, nilai budaya lokal yang dilandasi persaudaraan dan persamaan dapat dikembangkan dan dilestarikan; *kedua*, *muakhi* sebagai konsep budaya dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik sejalan dengan percepatan pembangunan daerah. Selain itu, pemosisian *muakhi* yang berdimensi *local genius* dalam sistem kebudayaan dapat dipahami dari adanya budaya lokal yang memiliki kemampuan, daya tahan, dan malahan dapat berkembang sejalan dengan nilai budaya baru yang berasal dari luar komunitasnya. Makna dan hakikat *local genius* diterima karena kemampuan bertahan terhadap budaya luar, kemampuan mengakomodasi budaya luar, kemampuan mengintegrasikan budaya luar ke dalam budaya asli, kemampuan mengendalikan, memberi arah perkembangan budaya, terbina secara kumulatif, terbentuk secara evolusioner, tidak abadi dan dapat menyusut. Jelas berarti konsep *local genius* berkaitan dengan budaya dan masyarakat. Oleh karenanya secara keilmuan dapat dijelaskan melalui pendekatan filsafat sosial.

Berdasar pemikiran itu, *muakhi* sebagai dasar nilai etika sosial dalam pembangunan daerah dapat ditelaah secara filsafat sosial. Sehingga kajian nilai-nilai etis itu menjadi ilmiah, mengingat kebenaran objek material maupun objek formalnya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah budaya *muakhi* yang bermakna filosofis terdapat dalam masyarakat adat Lampung Pubian ?; bagaimana relevansi *muakhi* pada dimensi moral, sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan pembangunan masyarakat; dan sejauhmana kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat, khususnya di Lampung.

II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini mengenai budaya *muakhi* dan pembangunan daerah yang dikaji dari perspektif filsafat sosial, khususnya pada komunitas adat Pubian di Lampung. Dalam penelitian kualitatif bidang filsafat, pengamatan untuk pengumpulan data lebih difokuskan pada aspek-aspek budaya yang berkaitan dengan filsafat, sistem pengetahuan, orientasi nilai, etika sosial pada komunitas adat Pubian. Penelitian dimaksudkan mendeskripsikan objek dan sasaran penelitian, dengan penetapan lokasi dipilih secara sengaja dan didasarkan pada adanya permasalahan di daerah, data dapat diperoleh, dan sumber informasi tentang masalah terkait dapat ditemukan.

Pengumpulan data diawali dari studi kepustakaan, pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menseleksi literatur, jurnal, laporan penelitian; dan melakukan kritik teori agar dapat ditemukan teori-teori yang tepat dan berguna untuk menjelaskan data. "Data berdasar studi kepustakaan dipadukan dengan penelitian lapangan pribadi dengan saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan, pemerincian, pengkhususan (Bakker & Zubair, 1990: 94). Pada bagian lain dinyatakan, pengamatan berperanserta dilakukan dengan cara membangun hubungan akrab antara subjek dan peneliti, sehingga dapat bekerjasama dengan saling bertukar informasi (Lexy J. Moleong, 2002: 95). Pengamatan langsung pada perilaku tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku budaya yang berkiprah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat, budaya dan pembangunan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan untuk memasuki dunia pikiran dan perasaan responden. Sehingga temuan penelitian dapat dirumuskan sebagai konsep dan teori baru. Metode penelitian kualitatif bidang filsafat dapat diimplementasikan, menurut Kaelan (2005: 197), dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua hal. *Pertama*, kita harus secara nyata mengadakan interaksi dengan responden. *Kedua*, kita menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang kita hadapi ialah bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengolah pandangan yang mungkin berbeda itu. Isi wawancara difokuskan pada pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, penginderaan, dan latar belakang pendidikan. Dan, dokumentasi diteliti untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen tertulis atau benda-benda lainnya.

Data kualitatif yang dihimpun terdiri atas kata-kata, kalimat dan deskripsi, bukan angka-angka. Oleh karena itu, informan dan responden dijadikan sebagai sumber

data. Informasi digali dari tokoh masyarakat, tokoh budaya, pejabat pemerintah daerah di eksekutif maupun di legislatif. Pengumpulan data menggunakan sistem kartu, rekaman, dan pengecekan silang. Metode sistematis refleksif dan sosiologis merupakan metode utama yang digunakan untuk menjelaskan objek material dan objek formal penelitian. Objek formalnya yaitu filsafat sosial, dengan menempatkan objek sasarnya secara utuh, integral, menyeluruh dan mendasar dalam ketotalitasannya. Dan, objek materialnya, fenomena sosial tentang budaya *muakhi* dalam pandangan hidup masyarakat lokal dan relevansinya dengan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan sejak awal perolehan data lapangan, yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan langkah-langkah analisis yaitu: (1) reduksi data), (2) "display" data, (3) pemahaman, interpretasi dan penafsiran, (4) mengambil kesimpulan dan verifikasi (Kaelan, 2005: 211). Kemudian dianalisis secara fenomenologis, sosiologis, interpretasi, idealisasi, dan koherensi berdasar data primer dan sekunder dalam kaitan teori dengan data yang sudah diolah dan diaplikasikan. Penyajiannya berupa pernyataan yang disajikan dalam bentuk teks, diklasifikasikan menurut tema dan sub-bahasan secara logis dan sistematis. Kritik teori dinalisis secara implisit dan aktual dengan mempergunakan unsur-unsur metodis berikut. *Pertama*, deskripsi dilakukan dengan cara menguraikan objek material agar diperoleh gambaran sebagaimana adanya, dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah data, yang dinilai akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan. *Kedua*, analisis sosial dilakukan secara kritis sebagai upaya membahas, memilah dan meneliti istilah-istilah, pengertian-pengertian mengenai pandangan hidup dan gagasan-gagasan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, khususnya yang terfokus pada *muakhi* dalam budaya lokal di Lampung. Selanjutnya, konsep pokok yang dicari adalah nilai-nilai filosofisnya, unsur-unsur pengetahuan yang terdapat dalam budaya *muakhi* dan temuannya dijustifikasi sebagai ilmu pengetahuan. *Ketiga*, dilakukan sintesis yang digunakan untuk memadukan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan yang berbeda untuk menemukan suatu kesatuan pendapat yang lebih utuh dan lengkap mengenai *muakhi* pada masyarakat adat dan relevansinya dalam pembangunan daerah, sehingga terumuskan konsep yang menyeluruh. *Keempat*, interpretasi dan idealisasi dilakukan untuk menyelami data yang tersedia dan mengungkap makna, nuansa dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam buku-buku dan berbagai hasil penelitian terdahulu, kemudian dicari hal-ha sebenarnya,

yang konsepnya ditelaah dari perspektif filsafat, dengan membebaskan dari segala liku-liku pikiran dan bumbu-bumbu kata. Kelima, koherensi digunakan untuk mencermati kesesuaian yang saling berhubungan serta keselarasannya dengan problem-problem manusia yang aktual terkait dengan pembangunan masyarakat di daerah. Sehingga dapat dirumuskan dengan benar berdasar interpretasi yang tepat, lengkap dan mendalam. Kemudian diuraikan secara *sistematik-logik* dan direfleksi-kan secara kritis, diperoleh pemahaman utuh dan komprehensif. Keterpaduan penerapan metode penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang sistematis, terarah, rasional, dan optimal dalam rangka pencapaian tujuan penelitian.

III. Hasil dan Analisis

A. *Muakhi* dalam Budaya Lampung

Muakhi berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga. Kata *muakhi* berasal dari kata *puakhi*, artinya saudara sekandung, dan saudara sepupu dari garis pihak bapak maupun ibu. Berbeda ungkapan kata ‘*muakhi*’ dalam masyarakat adat Pubian dengan masyarakat adat Abung yang menyebut ‘*mewarei*’ yang berarti bersaudara. Meski ada perbedaan bahasa dan pengucapan, tetapi *mewarei* dan *muakhi* pada hakikatnya bermakna sama yaitu bersaudara atau persaudaraan. *Muakhi* sebagai nilai dasar etika sosial dalam masyarakat lokal berdasar religi secara konseptual bersifat komprehensif dan universal. Untuk itu, universalisme *muakhi* harus dipahami dan diaktualisasikan dalam hubungannya dengan pelaku-pelaku sosial sebagai sesuatu yang menjadi kesadaran dan milik bersama, landasan moral pembangunan yang sama, dan suatu pencapaian bersama. *Muakhi* sebagai simbol dan modal sosial memberi identitas dan kekuatan di dalam adaptasi secara formal dan struktural yang dilakukan sekelompok pelaku sosial di Lampung. Faktanya, *muakhi* teraktualisasi dan memberi kontribusi pada tradisi serta berguna bagi pembangunan. Dalam konteks global, ekspresi *muakhi* sebagai dasar etika sosial bukan hanya ekspresi kelompok atau komunitas adat saja, tetapi juga ekspresi individu dan kelompok yang membedakan identitas lokal dari masyarakat global.

Relevansi *muakhi* sebagai nilai dasar etika sosial secara ontologis dan epistemologis memberi makna temuan teoritik baru dan berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat, pembangunan komunitas lokal, nasional dan global. Meski fokus kajian pada budaya *muakhi* dan relevansinya dalam pembangunan daerah itu bersifat lokal,

namun perspektif filsafat sosial dapat menjelaskan bahwa teori sosial tidak sekedar mengenal, memahami dan mengkaji perbedaan dan persamaan struktur sosial yang dinamis, tetapi juga secara aksiologis berguna untuk mempertanyakan dan mengembangkan teori-teori baru yang relevan dengan pembangunan daerah. Terlebih lagi, ketika masyarakat yang sedang menghadapi multi krisis, baik di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, moral yang berkepanjangan. Sehingga menyebabkan terjadi kerusakan, musibah, konflik komunal, dan bahkan ‘kebingungan spiritual’ dikalangan umat beragama yang semakin parah. Pandangan kefilsafatan dapat menjelaskan apa yang ada di balik istilah *muakhi* itu sehingga dapat mewujud sebagai bagian dari pandangan hidup dan pola pikir masyarakat adat serta relevan dengan pembangunan daerah.

Menganalisis budaya *muakhi* secara konseptual, dapat diawali dari memahami arti budaya dengan mengacu pada pendapat Raymond William yang menawarkan tiga definisi tentang ‘culture’ atau ‘budaya’ dalam arti yang sangat luas, dikutip John Storey dinyatakan. *Pertama*, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada “suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis. *Kedua*, budaya bisa berarti “pandangan hidup tertentu dari masyarakat, periode atau kelompok tertentu. *Ketiga*, budaya bisa menunjuk kepada “karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik (2003: 2-3). Berdasar konsep itu, kajian budaya memerlukan perspektif teori budaya, demikian kaya dan dapat dikaji secara parsial maupun sistemik. Secara teoritik, “budaya sebagai objek kajian dapat diganti dengan populasi organisme sebagai unit dasar analisis. Pergeseran budaya sebagai mekanisme adaptasi manusia agak diturunkan martabatnya sehingga hanya kelihatan sebagai ‘salah satu strategi’ dalam perilaku manusia”. Meski perlu dikritisi agar peneliti tidak mengabaikan fakta yang akan berakibat buruk pada kajian yang dilakukannya.

Muakhi sebagai nilai dasar etika sosial yang diaktualisasikan manusia hidup nampak pada proses transendensi dari eksistensinya yang terus menerus berusaha melampaui kehidupannya. Sementara proses transendensi yang diwujudkan itu tentunya dilandasi nilai-nilai etika dan moral. Berarti pemaknaan *muakhi* dapat mengacu pada pengertian etika sosial. Pakar ilmu filsafat mendefinisikan, “etika sosial adalah landasan pergaulan antar manusia yang berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan tingkah laku keseharian (Kaelan, 2002: 134). Lebih mendasar lagi, pakar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Musa Asy’arie (2002: 5) menyatakan:

Dalam konteks kajian filsafat, maka adanya kemampuan pikiran untuk mentrans- sendir realitas menjadi amat penting dan perlu dikembangkan lebih jauh, untuk memahami hakikat dibalik semua yang ada di dunia ini, hakikat makna yang ada di balik perubahan dan pergeseran yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia adalah kehidupan yang terus menerus berubah, bersifat kompleks dan multi dimensional. Perubahan adalah realitas permanen dalam kehidupan di dunia ini, di dalamnya ada kejatuhan dan kebangkitan, ada kekalahan dan kemenangan, ada pergantian posisi dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya, semuanya berjalan dalam mekanisme *sunnatullah* yang abadi, yang tidak mungkin dihindari.

Mencermati perkembangan budaya *muakhi* dalam kerangka memposisikannya dalam pembangunan daerah, dapat dikaji dari mengerti ‘apa pembangunan daerah itu’. Menurut Sunyoto Usman, pembangunan daerah sebetulnya bukanlah semata-mata duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional. Pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan *spirit* yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki (2004: 13). Masih dalam konteks itu, Soetomo menyatakan, Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat (2006: 40). Berarti jelas, kegiatan membangun masyarakat di daerah terkait erat dengan proses memberdayakan masyarakat karena di samping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif dalam kerangka memobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitasnya secara terprogram dan berkelanjutan.

Dalam perspektif filsafat sosial, *muakhi* sebagai nilai etika sosial hidup dan berkembang dalam budaya lokal mengacu pada pandangan hidup yang dinamis dalam suatu komunitas sosial, masyarakat adat Pubian di Lampung, yang dibatasi oleh unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Oleh karenanya, budaya lokal tidak dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, melainkan sebagai unsur ‘adonan’ yang membentuk identitas suatu komunitas budaya. Budaya *muakhi* sebagai kegiatan manusia secara etis, moral, mental dan spiritual, dapat dimulai dari proses usaha akan penertiban diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat. Sehingga *muakhi* membudaya dalam totalitas kehidupan masyarakat. Belajar dari konsep itu dapat dipahami, budaya *muakhi* dalam komunitas lokal merupakan pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada di pikiran manusia tentang budaya. Dalam pengertian umum, budaya lokal dimaksudkan sebagai budaya yang bukan saja berasal dari penduduk

asli Lampung, tetapi juga budaya yang dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, budaya masyarakat lokal adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup.

B. Budaya *Muakhi*:Pembangun Kesadaran

Sebenarnya *muakhi* sebagai etika dalam budaya lokal dapat difungsikan sebagai kajian untuk suatu perencanaan atau strategi pembangunan secara menyeluruh yang mengaitkan modal sosial berbasis daya kekuatan masyarakat lokal berdasar tanggung jawab manusia. Jika mengkaji *muakhi* sebagai etika pembangun kesadaran pelaku budaya dalam pembangunan daerah, tentu dibutuhkan kebijaksanaan berdasar pemahaman tentang etika yang tidak hanya menyebut peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah. Melainkan secara kritis dapat dipertanyakan, bagaimana pelaku budaya lokal bertanggung jawab ter-hadap hasil-hasil keputusannya sendiri. Pertanggung jawaban moral itu tentu tidak saja dihadapkan kepada masyarakat, tetapi juga dihadap- kan kepada pemerintah dan sang maha pencipta, yaitu Allah Swt. sebagai Tuhan seru sekalian alam.

Budaya *Muakhi* sebagai etika sosial berbasis religius perlu pembuktian keampuhan nya dalam menangani kasus-kasus konkrit, terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kelompok fakir miskin di berbagai daerah. Pemahaman *muakhi* sebagai etika sosial itu seharusnya tidak lagi hanya memberi isyarat-isyarat normatif umum, tetapi langsung melibatkan diri (dalam bentuk ‘aksi’) dalam peristiwa konkrit dan terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara etika dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebab etika sosial dibangun berdasarkan “interaksi”, yaitu hubungan tim-bal balik antara etika sebagai pedoman dengan masalah-ma-salah yang “memburni”. Sebab dapat dikatakan, perbedaan prinsip antara ajaran moral dan etika sosial terletak pada metode membangun kesadaran manusia. Kesadaran merupakan kondisi yang mencerminkan adanya otonomi dalam pengambilan keputusan tindakan manusia. Pelajaran diperoleh dari mengerti akan kaitannya dengan kondisi masyarakat Lampung yang tinggi tingkat pluralitasnya, di mana manusianya sangat terikat dengan kelompok akrab maupun abstraknya, bahkan cenderung egosentristik, terutama yang tinggal di perkotaan. Pemahaman itu sebenarnya dapat menjelaskan bagaimana pelaku budaya dan pejabat pemerintah

daerah sebagai manusia menjadi dewasa secara moral dan budaya, menjadi relevan dengan percepatan pembangunan daerah.

Masyarakat adat Pubian sebagai pelaku budaya memiliki posisi strategis dalam mempertahankan nilai dasar etika sosial dalam masyarakat lokal, melindungi hak-hak masyarakat adat, struktur masyarakat adat, sistem kekerabatan, pelaku budaya yang aktif dan dinamis dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Kondisi itu didukung oleh masyarakat Lampung sebagai masyarakat religius yang taat, hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Seorang pakar ilmu hukum adat dari Universitas Lampung, menyatakan: "...masyarakat Lampung selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai anugerah *Allah Subhanataala*. Sebagai implementasinya, dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam prilaku maka kaedah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai standar/ukuran perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasaan (Rizani Puspawidjaja, 2006: 13-14).

Budaya *Muakhi* sebagai nilai dasar etika sosial, sikap dan pandangan hidup dalam masyarakat adat Pubian lebih bermakna jika dikembangkan secara filsafat sosial dengan memposisikan berdasar ontologis, epistemologis dan axiologis. Pendekatan ontologis terhadap budaya *muakhi* dalam budaya lokal didasarkan atas etika rasional dan etika religius. Dari aspek epistemologis *muakhi* diposisikan sebagai bangunan ilmu pengetahuan yang dilandasi hakikat pengetahuan dan didasarkan pada pengandaian-pengandaian. Sehingga diperoleh pengetahuan yang benar, meski unsur subjektif tidak terlepas adanya. Ternyata *muakhi* sebagai konsep dan budaya dipahami secara beragam. Sehingga persepsi dan sikap masyarakat adat yang demikian itu mengindikasikan adanya *relativisme epistemologis*. Faktanya, budaya *muakhi* hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki nilai kearifan budaya lokal yang secara axiologis cukup bermakna bagi pembangunan daerah.

Pertemuan *muakhi* sebagai sikap dan pandangan hidup dengan masyarakat adat dicirikan adanya nilai etis berbasis ajaran Islam dan teraktualisasi dalam kehidupan dan kearifan budaya lokal. Sehingga melahirkan sebuah kontak pemikiran dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing komunitas sehingga terjadi proses dialektika pemikiran dalam masyarakat sejalan dengan dinamika pembangunan daerah. Respon yang berbeda terhadap proses akulterasi budaya menjadikan

masyarakat mampu beradaptasi dan hidup toleran. Meski dipahami, potensi konflik yang bersifat laten perlu diantisipasi dengan membangun kesadaran dan menjunjung tinggi persaudaraan dan kebersamaan yang benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Membangun budaya *muakhi* dan kemuakhian sebagai nilai etis berbasis persaudaraan dan kebersamaan dalam budaya budaya merupakan modal sosial dapat berguna bagi pembangunan.

Dengan pandangan dunia sebagai keyakinan masyarakat tentang budaya *muakhi* yang berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat sungguh bermakna bagi hidup dan pengalamannya. Satu kesatuan pengalaman hidup dalam membangun persaudaraan ternyata tidak di bagi-bagi dalam berbagai bidang yang terpisah-pisah, tetapi benar-benar dipahami persaudaraan bermakna bagi masyarakat dan pembangunan. Bagi orang Lampung, pandangan dunia bukan diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan berfungsi sebagai sarana dalam usahanya untuk berhasil dalam menjalani dan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Secara pragmatis, pandangan dunia diartikan kerangka kerja dan cara mencapai suatu keadaan yang menunjuk pada adanya ketenangan, ketenteraman, dan keseimbangan batin. Bagi mereka, masa hari tua perlu dinikmati, tapi bukan untuk mencari kenikmatan sesaat dan merusak orang lain.

Membangun kesadaran dalam keberagaman budaya dan masyarakat majemuk membutuhkan persaudaraan dan kebersamaan sebagai landasan moral dan etika sosial yang sekaligus merupakan ciri khas masyarakat bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa, termasuk juga budaya dalam masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung dengan kemajemukan pendukuk, suku bangsa, penganut agama, dan budaya yang dibawa dari daerah asal yang dikaji secara ilmiah baik dari aspek sosiologis, antropologis, geografis dan historis dapat berguna bagi pembangunan. Kemajemukan budaya dan kelompok sosial menunjuk pada sebuah miniatur daerah yang mencerminkan ragam budaya, adat dan perilaku sosial dari sejumlah suku bangsa penghuninya. Masyarakat adat berubah disebabkan oleh berbagai kekuatan dari dalam maupun luar. Sehingga menyebabkan apa yang dikatakan para akademisi dan birokrat dalam mengidentifikasi komunitasnya sebagai penduduk asli dan penduduk pendatang. Padahal, tak akan ada sebuah entitas bangsa dan negara yang bernama Indonesia, jika tidak ada kemajemukan. Karena itulah kemajemukan negara bangsa dan budaya lokal harus dipelihara, dirawat, diberdayakan dan difungsionalisasikan agar masyarakat dapat membangun daerahnya

secara lebih baik menuju masyarakat yang lebih bermartabat di masa depan. Berarti jelas, *muakhi* sebagai nilai etis dalam budaya lokal berfungsi untuk membangun kesadaran moral, perekat sosial, budaya, ekonomi, politik dan persatuan bangsa di masa depan.

C. Sinergitas *Muakhi* dan Pembangunan Daerah

Muakhi sebagai ikatan persaudaraan atas dasar persamaan kemanusiaan merupakan salah satu kapital sosial tumbuh dalam lingkungan masyarakat adat Lampung, khususnya pada komunitas adat Pubian. Memposisikan *muakhi* dalam pembangunan daerah berarti dapat menjalin dan memperkokoh relasi sosial yang ada, namun hal ini hanya bisa terjadi apabila setiap individu atau sekelompok individu memiliki kemauan baik terhadap individu atau kelompok lain. Kesadaran kelompok ataupun *group consciousness* bersumber dari kemauan mereka yang berada pada tataran struktur serta kandungan yang muncul dari relasi antara orang yang satu dengan lainnya. Artinya, *muakhi* dapat berjalan lancar jika terjalin interaksi satu sama lain dengan nuansa persaudaraan dan kerjasama yang erat, dimana hal itu dapat dibangkitkan pada aliran arus informasi, pemberian pengaruh, serta kesetiakawanan yang mengarah pada para pelaku interaksi yang bersangkutan. Tegasnya, kemuakhan menjadi semacam mekanisme yang mampu mengolah potensi menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan masyarakat. Situs ontologi dalam hal ini adalah integrasi, sehingga *muakhi* bisa menentukan kualitas interaksi sebuah masyarakat.

Dalam paradigma integratif, komunitas adat tampak bersifat responsif, tidak pasif. Komunitas yang responsif digunakan untuk memberikan status penuh, baik kepada perseorangan maupun kepada persatuan bersama atau kelompok. Komunitas yang responsif lebih terintegrasi dibandingkan dengan agregat individu yang memaksimalkan diri. Oleh karena itu, baik individu maupun komunitas, keduanya adalah esensial, sehingga mempunyai kedudukan fundamental yang setara berdasar kebersamaan dan persaudaraan. Individu dan komunitas saling membentuk dan saling membutuhkan dalam kerangka membangun daerah.

Pemahaman seperti itu membuktikan, *muakhi* memiliki fungsi integratif antara satu dengan lainnya. Sehingga setiap individu terangsang untuk menumbuhkan nilai kebersamaan atau persaudaraan, dimana hal itu sudah diawali dari dalam diri masing-masing individu dengan menggunakan kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki

masyarakatnya. *Muakhi* adalah nilai yang sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, dan karenanya *muakhi* menjadi variable strategis dalam mendorong kekuatan kolektif dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk perubahan yang memiliki dampak buruk.

Sinergisitas *muakhi* dan ukhuwah dipahami dalam kerangka reaktualisasi nilai etika dan estetika yang berguna bagi persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini diperlukan pencerahan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang *muakhi* dan ukhuwah sebagai nilai-nilai dasar etika sosial. Pengembangannya harus didukung oleh bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar persoalan itu tidak mandek dalam kebekuan normatif dan dogmatis. Sebab posisi bahasa daerah merupakan kekayaan yang memiliki kontribusi dan sangat strategis bagi pendukungnya sehingga dapat membangun persaudaraan dan kebersamaan dalam proses pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, wawasan komunitas adat tentang *muakhi* dan ukhuwah dapat berkembang jika memperoleh dukungan masyarakat dan tidak menjadi kontra produktif dan destruktif. Dengan tumbuhnya budaya *muakhi* dan ukhuwah sebagai ikatan persaudaraan atas dasar persamaan kemanusiaan yang merupakan landasan etika sosial dan kearifan budaya lokal tentu berguna bagi perekat persatuan bangsa di masa depan.

Muakhi sebagai salah satu kapital sosial yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat adat Lampung, khususnya pada komunitas adat Pubian dapat menjalin dan memperkokoh relasi sosial yang ada, namun hal ini hanya bisa terjadi apabila setiap individu atau sekelompok individu memiliki kemauan baik terhadap individu atau kelompok lain. Kesadaran kelompok ataupun *group consciousness* bersumber dari kemauan baik yang berada pada tataran struktur serta kandungan yang muncul dari relasi antara orang yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, *muakhi* dapat berjalan lancar apabila terjalin interaksi satu sama lain dengan nuansa kerjasama yang erat, dimana hal itu dapat dibangkitkan pada aliran arus informasi, pemberian pengaruh, serta kesetiakawan yang mengarah pada para pelaku interaksi yang bersangkutan. Dengan demikian, kemuakhan menjadi semacam mekanisme yang mampu mengolah potensi menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan komunitas masyarakat. Situs ontologi dalam hal ini adalah integrasi, sehingga *muakhi* bisa menentukan kualitas interaksi sebuah masyarakat.

Dalam paradigma integratif, komunitas adat tampak bersifat responsif, tidak

pasif. Komunitas adat yang responsif digunakan untuk memberikan status penuh, baik kepada perseorangan maupun kepada persatuan bersama atau kelompok. Komunitas yang responsif lebih terintegrasi dibandingkan dengan agregat individu yang memaksimalkan diri. Oleh karena itu, baik individu maupun komunitas, keduanya adalah esensial, sehingga mempunyai kedudukan fundamental yang setara berdasar kebersamaan dan persaudaraan. Individu dan komunitas saling membentuk dan saling membutuhkan dalam kerangka membangun daerah.

Masyarakat adat Pubian dalam perspektif filsafat sosial adalah orang-orang yang dalam hidup keseharianya mengaktualisasikan moral, memiliki bahasa dengan ragam dialek, aksara, tradisi yang dinamis dan terjadi dalam proses interaksi dan terintegrasi dengan Islam. Sebab apa yang terjadi, tradisi Islam berakulturasi dengan budaya Lampung dan ataukah Islam dan Lampung saling mempengaruhi. Mungkin saja, yang tengah terjadi adalah integrasi nilai sebagai Islamisasi kultur dalam masyarakat lokal. Konteks itu memperjelas, sekiranya *muakhi* sebagai nilai-nilai etis teraktualisasi dan membudaya sejak lama dalam masyarakat adat di Lampung. Kesadaran kelompok itu memang realitas, bahkan kepentingan kelompok itu dirasakan dan dihayati oleh anggotanya sebagai kepentingan dirinya juga. Sikap demikian nampak pada waktu ‘saudara tua’ nya (bahasa Lampung: Kiay; Kanjeng) akan menyelenggarakan hajat pernikahan putranya dengan upacara perkawinan secara adat. Kesadaran dan kesediaan untuk berkorban guna membantu saudaranya itu menjadi nilai umum. Dan sekiranya ada diantara saudara yang lain tidak peduli terhadap hajat itu, tentu akan mendapatkan sanksi sosial dari warga adat. Secara lebih luas dapat dikatakan, nilai-nilai persaudaraan dalam budaya *muakhi* merupakan dasar moral yang berguna bagi pembangunan daerah Lampung.

Karakteristik utama yang sangat dominan dalam komunitas adat Lampung Pubian adalah kehidupan mekanistik masyarakat yang sarat akan perasaan kebersamaan, kerjasama, interaksi sosial yang intens, kearifan lokal, serta kedamaian yang mengejawantah dalam kemuakhan. Karakteristik inilah yang harus dipertahankan dan bahkan diperteguh untuk mencapai aksi-aksi kolektif produktif masyarakat dalam merancang dan mencapai kesejahteraannya sendiri. Karakteristik vital dalam kehidupan komunitas inilah yang dapat dijadikan modal dasar dalam menggalang aksi-aksi kolektif dalam menghambat dampak negatif perubahan dan pembangunan.

Kapital sosial yang dikembangkan dari kajian sosiologi dengan aliran struktural, meminjam konsep penting dari ilmu ekonomi untuk menggambarkan bahwa konsep

yang dimaksud memiliki dampak positif pada aksi-aksi kolektif di masa yang akan datang. Kapital ini dapat diinvestasikan untuk kemanfaatan di masa yang akan datang, dapat dikembangkan, dan dapat dikonversikan, serta membutuhkan *maintenance* untuk mengembangkannya. Interaksi timbal balik, jaringan sosial, kerjasama, nilai untuk saling mempercayai, serta norma-norma adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia, demikian pentingnya sehingga perlu menggunakan kata kapital yang setara dengan kapital dalam konsep ekonomi yang tidak mungkin ditiadakan dalam proses produksi. Pengembangan masyarakat (*community development*) yang memanfaatkan kapital sosial dalam proses kerjanya.

Muakhi sebagai nilai etis budaya lokal teraktualisasi dalam pembangunan daerah. Indikasinya, terbentuknya Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) yang kini berubah nama menjadi Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) yang dengan eksistensinya menunjuk pada semakin kuatnya nilai persaudaraan dan kebersamaan untuk membangun daerah Lampung. Rekonsiliasi *Punyimbang Adat Lampung* diperlukan untuk koordinasi dalam rangka membahas berbagai masalah (adat-istiadat; budaya Lampung; dan pembangunan daerah); sehingga menghasilkan keputusan-keputusan baru (misal: Sistem Pengelolaan Tanah Hak Ulayat; Kepunyimbangan Adat Lampung; sistem, mekanisme, prosedur dan prosesi; Upacara Canggot Agung, Canggot Bakha) yang mengikat atau di "PERDA"-kan. Sehingga memiliki kekuatan hukum bagi masyarakat adat guna pembangunan daerah. Tentunya rekonsiliasi itu perlu dijadikan agenda kegiatan yang terprogram dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Fakta membuktikan, aktualisasi budaya *muakhi* memberi kontribusi pada dimensi moral, sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam pembangunan daerah. Meski bentuk dan sifat kontribusi itu intensitas dan sifatnya beragam pada kelompok masyarakat.

IV. Simpulan

Pertama, *Muakhi* sebagai nilai dasar etika sosial terdapat dalam masyarakat adat pepadun di Lampung. Budaya *muakhi* yang dilandasi filsafat hidup *Piil Pesenggiri* dapat dikembangkan secara *substansial* dan *fundamental*. Sebab substansi budaya Lampung sebenarnya ada dalam pemahaman dan pengamalan orang Lampung sebagai pelaku budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman tentang *muakhi* dalam masyarakat adat Lampung menjadi *urgent*, karena *muakhi* sebagai sikap dan nilai etika sosial berimplikasi terhadap

persaudaraan dalam lingkungan keluarga, kerabat, kehidupan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat.

Kedua, budaya muakhi sebagai ikatan persaudaraan atas dasar persamaan kemanusiaan yang merupakan nilai etis dalam sistem budaya lokal berfungsi untuk membangun kesadaran moral, perekat sosial, budaya, ekonomi, politik, dan persatuan bangsa. Jika *muakhi* diaktualisasikan, tentu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku produktif dalam keluarga dan masyarakat untuk pembangunan. Sebab sikap dan perilaku produktif dalam keluarga menentukan arah keberhasilan pembangunan daerah, yang terjadi secara interaktif dan sinergis. Ketiga, aktualisasi budaya *muakhi* memberi kontribusi pada dimensi moral, sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam pem- bangunan. Meski bentuk dan sifat kontribusi itu intensitas dan sifatnya beragam pada kelompok masyarakat. *Muakhi* sebagai nilai etis dalam budaya daerah yang dilandasi persaudaraan dan persamaan dapat dikaji, dikembangkan dan dilestarikan melalui berbagai pendekatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, (Peng.), *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2003.
- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Anshari, Endang Saifudin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- _____, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, Yokyakarta: LESFI, 2002.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 1984.
- _____, Charris Zubair, A., *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta Departemen Agama, 1991/1992, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Projek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995.